



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/06/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2023.
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/06/2023
TANGGAL 5 JUNI 2023

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2023

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI SIAP
DITAWARKAN

1. Jalan Tol Semanan – Balaraja; dan
2. Jalan Tol Layang Dalam Kota Ruas Cikunir - Karawaci.

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI DALAM
PROSES PENYIAPAN

1. Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat;
2. Bandar Udara Bintan, Kepulauan Riau;
3. Pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara;
4. Perkeretaapian Perkotaan Metropolitan Bandung;
5. *Transit Oriented Development* (TOD) Terminal Tipe A Poris Plawad, Tangerang;
6. Pengembangan Terminal Tipe A Betan Subing di Provinsi Lampung;
7. Pengembangan Terminal Tipe A Purabaya di Provinsi Jawa Timur;
8. Jalan Tol Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar);
9. Jalan Tol Cilacap – Yogya;
10. Jalan Tol Demak – Tuban;
11. Jalan Tol Malang – Kepanjen;
12. Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Babat;
13. Jalan Tol Semarang *Harbour*;
14. Jalan Tol Tuban – Babat – Lamongan – Gresik;
15. Preservasi Jalan Kabupaten Madiun;
16. *Operation and Maintenance* (OM) Jembatan Suramadu *bundling* dengan Surabaya *Eastern Ring Road*;
17. Jembatan Batam – Bintan;
18. Bendungan Bodri;
19. Bendungan Merangin;
20. PLTA Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan;
21. Daerah Irigasi Komerang, Sumatera Selatan, dan Lampung;
22. Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi *High Level Diversion* (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok, Nusa Tenggara Barat;

23. Sistem ...

23. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro, D.I. Yogyakarta;
24. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Sinumbra, Jawa Barat;
25. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Ir. H. Djuanda (Jatiluhur II);
26. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Lau Biang/Lau Dah, Kabupaten Karo;
27. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatigede (Cirebon Raya);
28. Sistem Penyediaan Air Minum Kota Denpasar;
29. Revitalisasi NRW Sistem Penyediaan Air Minum Kota Sukabumi;
30. Pembangunan TPA Sampah Regional Piyungan, D.I. Yogyakarta;
31. TPAS Manggar;
32. Pembangunan PSEL Kota Tangerang Selatan;
33. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik Secara Terpadu di Regional Sumatera;
34. Palapa Ring Terintegrasi;
35. Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Batam;
36. Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Palembang;
37. Penerangan Jalan Umum Kabupaten Bandung;
38. Revitalisasi dan Pembangunan Alat Penerangan Jalan Kota Denpasar;
39. Alat Penerangan Jalan beserta *Smart Roadway Monitoring System* Kota Medan;
40. Alat Penerangan Jalan Kabupaten Banyumas;
41. Alat Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi;
42. Pengelolaan dan Pembangunan Armada Kapal Riset Nasional;
43. Pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Padjadjaran;
44. Proyek Kawasan *Sport Centre* Kota Serang, Banten;
45. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah I A Moeis Kota Samarinda;
46. Relokasi RSUD dr. Mohammad Zyn Kabupaten Sampang;
47. Pembangunan Lembaga Perasyarakatan di Nusa Tenggara Barat;
48. Perumahan Cisaranten Bina Harapan;
49. Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara; dan
50. Rumah Susun Karawang Spuur.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati